

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu proses dalam rangka perubahan pada pembentukan sikap, kepribadian, dan keterampilan manusia dalam menghadapi suatu masa depan yang dimana pertumbuhan dan perkembangannya baik itu jasmani maupun rohani secara terus menerus dalam suatu usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat dan mengikuti perkembangan jaman. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Salah satu mata pelajaran yang berperan dalam Pendidikan Indonesia adalah **Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn)**. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan berhubungan antar warga Negara dan Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara (PPBN) agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 27 UUD 1945).

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) bertujuan membangun kesadaran siswa akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta menanamkan nilai-nilai seperti kedisiplinan dan tanggung jawab sosial. Di Indonesia, penerapan pendidikan karakter dan nilai kewarganegaraan sangat penting agar peserta didik siap berkontribusi dalam masyarakat serta memahami perannya di masa depan. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan berhubungan antar warga Negara dan Negara serta pendidikan pendahuluan bela Negara (PPBN) agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 27 UUD 1945).

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan sejak dini. Karena salah satu tujuannya untuk membentuk karakter dan kepribadian masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education sudah diajarkan sejak era Presiden Soekarno, tepatnya sekitar tahun 1901 hingga 1970. Menurut Edi Rohani dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri) (2019), nama atau istilah untuk pendidikan kewarganegaraan beberapa kali mengalami perubahan.

Pada 1968, Pendidikan Kewarganegaraan diubah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara. Namanya diubah lagi pada 1975 menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Kemudian pada 1994, namanya mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada 2000, namanya diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembelajaran yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Hal ini diperlukan supaya masyarakat Bangsa Indonesia memiliki kesadaran untuk mencintai tanah air serta memiliki watak, sifat dan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Menurut Minto Rahayu dalam Buku Pendidikan Kewarganegaraan (Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa), tujuan dari hakikat pendidikan kewarganegaraan ialah membekali masyarakat untuk bisa menjalin hubungan yang berlandaskan Pancasila, baik dengan negara ataupun sesama manusia.

Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari pemaknaan kedua kata tersebut, yakni kata 'pendidikan' serta kata 'kewarganegaraan'. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar maupun terencana dalam proses pembelajaran agar bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Sedangkan kewarganegaraan merupakan segala hal yang memiliki keterkaitan dengan warga negara, hukum serta politik.

Secara yuridis Latar belakang yuridis dari pendidikan kewarganegaraan tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 serta rumusan Pancasila. Selain itu, secara yuridis pendidikan kewarganegaraan juga tercantum dalam peraturan yang

dibuat pemerintah dan MPR. Contohnya Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Seluruh hal ini saling berhubungan dan memiliki kekuatan yang mengikat satu sama lain.

Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai fondasi bagi pembentukan warga negara yang baik, memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan nilai-nilai luhur dan sikap positif pada siswa. Melalui PKn, siswa tidak hanya diajark untuk memahami konsep-konsep dasar negara, tetapi juga diajarkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat dapat menumbuhkan cinta tanah air, memupuk semangat nasionalisme dan patriotisme. Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat membangun demokrasi yang berkelanjutan, meningkatkan Kesadaran akan hak dan kewajiban serta membentuk karakter yang tangguh dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan menanamkan sikap disiplin, yaitu taat pada aturan dan mampu mengatur diri sendiri. Pendidikan Kewarganegaraan juga mendorong siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial, yaitu kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Siswa diajak untuk terlibat dalam kegiatan sosial, seperti gotong royong, membantu sesama, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang sangat penting dalam mencapai dua sasaran utama yang seimbang. Pertama, tujuan pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik tentang etika, moral, dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, tujuan kedua adalah membentuk sikap, perilaku, dan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kedua sasaran ini harus dicapai secara bersamaan, sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep dan prinsip-prinsip ilmu yang berlaku, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan utama yang dihadapi dunia pendidikan adalah **rendahnya sikap tanggung jawab sosial** di kalangan peserta didik.

Di sekolah, sikap kurang bertanggung jawab sering terlihat dalam bentuk keterlambatan hadir, ketidakpatuhan pada peraturan sekolah, dan ketidakhadiran

saat kegiatan upacara. Selain itu, sebagian siswa kurang menunjukkan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan sosial yang diselenggarakan sekolah. Hal ini menandakan bahwa penerapan nilai-nilai yang diajarkan dalam pelajaran PPKn belum sepenuhnya efektif.

Tanggungjawab merupakan suatu masalah yang sangat penting dan menarik untuk di bahas dan diteliti, sebab siswa merupakan bagian dari generasi muda dan tumpuan harapan untuk membangun masa depan bangsa dan negara. Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban baik orang tua, ataupun guru untuk dapat mempersiapkan generasi muda menjadi generasi yang lebih baik, berwawasan, dan berpengalaman luas serta mempunyai akhlak dan moral yang lebih baik, sehingga dapat di didik, di ajarkan, dilatih dan diarahkan sehingga dapat menjadi warga sekolah yang disiplin.

Menurut Mustari (2014:36) “Kedisiplinan dan rasa tanggung jawab merupakan modal dasar dalam pembelajaran, sebab dengan adanya kedisiplinan dapat menciptakan suasana belajar mengajar di lingkungan sekolah.

Disiplin sangat diperlukan dalam rangka menggunakan pemikiran yang sehat untuk dapat menentukan jalannya tindakan yang terbaik dalam menentang suatu hal-hal yang lebih dikehendaki. Siswa yang mempunyai sifat disiplin dengan baik atau sudah terbiasa pada kedisiplinan yang tinggi yang didapatkan dalam pendidikan dan diterapkan oleh orang tua serta keluarga, maka siswa tersebut akan melakukan proses belajar dengan sukarela, sadar dan dengan penuh tanggung jawab dan begitu juga sebaliknya”. Menciptakan kedisiplinan siswa bertujuan untuk mendidik siswa agar sanggup menciptakan dirinya sendiri. Mereka dilatih agar dapat menguasai kemampuan bahkan juga melatih siswa agar dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga para siswa dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri.

Selain disiplin, tanggung jawab menjadi hal penting untuk di tanamkan dalam dunia Pendidikan. Tugas menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab pada siswa di sekolah adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh semua guru. Peran penting semua guru dalam hal ini tidak dapat disangkal, meskipun seringkali dianggap bahwa guru mata pelajaran

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena mengandung banyak materi pendidikan karakter, pembentukan sikap disiplin dan tanggung jawab sosial bukanlah tugas yang hanya ditugaskan pada guru-guru tersebut. SMP Negeri 1 Tigapanah merupakan salah satu sekolah yang berupaya menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab sosial kepada peserta didik. Meski demikian, masih ditemukan beberapa siswa yang belum konsisten dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Misalnya, mereka terlambat masuk kelas, tidak mengikuti upacara bendera secara rutin, atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penerapan pendidikan PPKn dalam membentuk sikap siswa.

Disiplin dan tanggung jawab sosial merupakan dua nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap individu, terutama generasi muda. Meskipun pendidikan kewarganegaraan telah menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah, namun masih banyak ditemukan permasalahan terkait rendahnya kesadaran ketertiban dan tanggung jawab sosial di kalangan siswa. Hal ini didukung juga oleh karakter yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka yang dikenal dengan Profil Pelajar Pancasila. Rancangan Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020, Kemendikbud memiliki visi yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dalam Profil Pelajar Pancasila secara tidak langsung diperlukan sikap disiplin dan tanggung jawab sosial. Hal ini sebagai kompas bagi satuan pendidikan dalam mewujudkan karakter dan kompetensi peserta didik serta budaya sekolah sehingga penting untuk diperhatikan.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pendidikan PPKn mempengaruhi sikap tanggung jawab sosial siswa di SMP Negeri 1 Tigapanah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi bagi sekolah dan guru PPKn untuk meningkatkan metode

pembelajaran mereka.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah yang teridentifikasi adalah:

1. **Kurangnya kesadaran siswa** terhadap pentingnya pembelajaran PPKn bagi kehidupan sehari-hari.
2. **Keterbatasan pendidikan PPKn** dalam menanamkan nilai tanggung jawab sosial secara konsisten.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada **pengaruh pendidikan PPKn terhadap sikap tanggung jawab sosial siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Tigapanah**. Fokus penelitian adalah pada bagaimana pelajaran PPKn mampu mempengaruhi aspek tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh pendidikan PPKn terhadap kesadaran tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari siswa **kelas VII di SMP Negeri 1 Tigapanah?**
2. Bagaimana Pengaruh pendidikan PPKn terhadap kesadaran tanggung jawab sosial siswa **kelas VII di SMP Negeri 1 Tigapanah?**

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pendidikan PPKn terhadap kesadaran tanggung jawab sosial siswa **kelas VII di SMP Negeri 1 Tigapanah**.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan PPKn terhadap kesadaran tanggung jawab sosial siswa **kelas VII di SMP Negeri 1 Tigapanah**.

1.6 Manfaat Penelitian

1. **Bagi Sekolah** : Memberikan masukan dalam meningkatkan penerapan pendidikan karakter (tanggung jawab) melalui PPKn.
2. **Bagi Universitas Quality** : Sebagai tambahan sumber literatur di Universitas Quality.
3. **Bagi Peneliti Lain** : Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dalam bidang pendidikan karakter.

